



BERMAIN KANO: Komunitas Korps Relawan Peduli Sungai Soloraya (Karsa) bermain olahraga Kano di Bendungan Tirtonadi, Solo, Jawa Tengah, Minggu (13/6). Kegiatan bertajuk ‘Ngano Ing Solo’ tersebut bertujuan mendorong pemanfaatan kawasan Bendungan Tirtonadi sebagai sarana rekreasi dan destinasi wisata Kota Solo.

Batalkan Sambungan hal 1

Sementara di sisi lain, Pemerintah terus berupaya mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional dengan menjalankan berbagai kebijakan strategis, salah satunya melalui pemberian insentif fiskal berupa penurunan tarif Pajak Penjualan atas Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPnBM DTP) untuk kendaraan bermotor khususnya mobil dengan spesifikasi tertentu.

“Kementerian Keuangan sudah senada dengan kami, bahwa PPnBM DTP dapat diperpanjang. Hal ini sesuai arahan Bapak Presiden Joko Widodo, diperlukan terobosan untuk tetap menciptakan iklim usaha yang kondusif di tengah kondisi pandemi. Ini bertujuan membangkitkan kembali gairah usaha di Tanah air, khususnya sektor industri, yang selama ini konsisten berkontribusi signifikan bagi perekonomian nasional,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita.

Perpanjangan pemberian insentif PPnBM DTP diusulkan Menperin dan disetujui Menkeu Sri Mulyani dalam rapat Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang dipimpin Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Jumat (11/6).

Sejak 1 Maret 2021, Pemerintah menerapkan kebijakan PPnBM DTP terhadap pembelian mobil baru. Program ini dimulai untuk mobil penumpang 1.500 cc dengan kandungan lokal tertentu. Skemanya, pertiga bulan diberlakukan perubahan po-

tongan pajak, yakni Maret-Mei diskon 100 persen, Juli-Agustus 50 persen, dan Oktober-Desember 25 persen. Seiring perkembangan implementasi kebijakan tersebut, kinerja industri otomotif dan penjualan mobil menunjukkan tren positif.

Anggota DPR RI Mukhammad Misbakhun juga mengkritisi rencana Kemenkeu memungut PPN sembako dan pendidikan melalui perluasan objek PPN. Menurutny, sembako atau bahan pokok, sektor pendidikan, dan kesehatan tidak boleh dipungut pajak. Sebab ketiga sektor tersebut merupakan amanat konstitusi dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sebagai tujuan negara.

“Kalau beras dijadikan objek pajak dan dikenakan PPN, pengaruhnya pada kualitas pangan rakyat. Rakyat butuh pangan yang bagus agar kualitas kehidupan mereka juga baik,” kata Misbakhun.

Politisi Partai Golkar itu menyebutkan, Kemenkeu harus bertanggung jawab atas polemik soal RUU KUP itu. “Polemik yang terjadi dan penolakan keras di masyarakat atas rencana Kemenkeu ini sangat mempengaruhi citra Presiden Jokowi dan pemerintahan yang dikenal sangat prorakyat kecil,” ujar Misbakhun.

Ia juga menentang ide Kemenkeu tentang PPN sektor pendidikan karena pendidikan adalah simbol pembangunan karakter sebuah bangsa. “Pendidikan itu menunjukkan kualitas SDM sebuah negara. Kalau pen-

didikan sampai dijadikan objek pajak dan dikenakan tarif PPN, kualitasnya akan terpengaruh,” ujar Anggota Komisi XI DPR ini.

Kepala Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Felippa Ann Amanta mengungkapkan, rencana pengenaan PPN sektor sembako dan pendidikan tidak saja akan meningkatkan harga pangan sehingga mengancam ketahanan pangan, tetapi juga akan berdampak buruk kepada perekonomian Indonesia secara umum.

Felippa menyatakan, kebijakan seperti itu akan meningkatkan harga pangan, mengancam ketahanan pangan, hingga mempengaruhi perekonomian Indonesia secara keseluruhan karena akan mempengaruhi konsumsi masyarakat.

Menurutnya, pengenaan PPN sembako mengancam ketahanan pangan terutama bagi masyarakat berpendapatan rendah sehingga lebih dari sepertiga masyarakat Indonesia tidak mampu membeli makanan yang bernutrisi karena harganya mahal. “Menambah PPN akan menaikkan harga dan memperparah situasi apalagi di tengah pandemi ketika pendapatan masyarakat berkurang,” ujarnya.

Ia menjelaskan, pangan berkontribusi besar pada pengeluaran rumah tangga sementara bagi masyarakat berpendapatan rendah belanja kebutuhan pangan bisa mencapai sekitar 56 persen dari pengeluaran rumah tangga mereka.

Pajak Sambungan hal 1

Rencana pemerintah pada akhirnya menjadi beban bagi masyarakat. Itu karena lembaga pendidikan, terutama swasta, dalam praktiknya pasti akan menambahkan pembayaran PPN pada masyarakat. Dampaknya, biaya yang dikeluarkan orang tua untuk pendidikan anak, semakin besar. Jika kondisi ini terjadi, akses masyarakat untuk pendidikan berkualitas dengan biaya terjangkau pasti terbatas. Komersialisasi pendidikan semakin menjadi kenyataan.

Pertanyaannya, bagaimana dengan peta jalan pendidikan nasional untuk mewujudkan generasi emas 2045? Dengan akses pendidikan yang terbatas akibat beban pembiayaan yang semakin tinggi, maka ancaman generasi emas 2045 itu pasti terancam. Padahal dengan skema pembiayaan seperti sekarang, data partisipasi pendidikan masih menunjukkan belum 100% warga bangsa mengenyam pendidikan level SD dan SMP. Partisipasi pendidikan untuk SD di kisaran 98% . Sementara untuk SMP di posisi 80%. Itu berarti masih ada warga bangsa yang tidak lulus SD dan SMP.

Rencana pemungutan PPN lembaga pendidikan juga menunjukkan pemerintah tidak memiliki *sense of crisis* terhadap kondisi lembaga pendidikan yang dikelola masyarakat. Saat pandemic ini, banyak lembaga pendidikan mengalami kesulitan biaya opera-

sional. Akibatnya, sejumlah penyelenggara pendidikan tidak mampu membayar gaji guru dan karyawan dengan layak. Penyebab utamanya adalah donasi pendidikan dari orang tua mengalami penurunan drastis selama pandemi. Kondisi itu terutama sekali dialami lembaga pendidikan swasta yang dikelola berbagai kelompok masyarakat.

Dapat dipahami jika terjadi gelombang penolakan terhadap rencana pemerintah tersebut. Dua ormas besar, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU), termasuk yang paling keras bersuara. Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir menyatakan sangat keberatan dengan pajak pendidikan yang termaktub dalam Rancangan Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan (RUU-KUP) yang diajukan pemerintah ke DPR. Haedar menyatakan : “seharusnya ormas keagamaan yang membantu meringankan beban pemerintah dengan mendirikan sekolah swasta mendapat *reward*, bukan malah dibebani pajak”.

Pandangan senada dikemukakan Ketua Lembaga Pendidikan Ma’arif PBNU Arifin Junaidi. Dia menyatakan tidak habis pikir dengan sikap pemerintah seraya menanyakan *mindset* para pengambil kebijakan negeri ini. Keberatan Muhammadiyah dan NU dapat dipahami karena dua ormas ini sangat menonjol

kiprahnya dalam dunia pendidikan. Dua ormas ini menyelenggarakan puluhan ribu lembaga pendidikan dalam berbagai tingkat dan jenisnya. Bahkan, ketika negeri ini belum lahir, Muhammadiyah dan NU sudah mendirikan lembaga pendidikan. Di sejumlah daerah berkategori terdepan, tertinggal, terluar (3T), kehadiran lembaga pendidikan nonpemerintah juga seringkali lebih dulu.

Rasanya sulit dibayangkan jika ormas keagamaan dan berbagai kelompok masyarakat tidak menyelenggarakan pendidikan swasta untuk membantu tugas negara dalam mencerdaskan bangsa. Tanpa sekolah swasta, negara pasti akan mengalami kesulitan untuk menunaikan amanah konstitusi di bidang pendidikan.

Harus diakui, memang ada sebagian lembaga pendidikan swasta yang mapan dan berbiaya mahal. Tetapi jumlah sekolah kategori ini sangat sedikit. Kategori lembaga pendidikan swasta yang paling banyak adalah kecil dan miskin. Dengan kondisi seperti ini, patutkah negara memungut pajak dari lembaga pendidikan? Rencana ini bukan hanya kontraproduktif, melainkan juga bertabrakan dengan tugas negara dalam menunaikan amanah konstitusi.

(Penulis adalah Guru Besar UIN Sunan Ampel, Wakil Sekretaris Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur)-f

KOORDINASI DENGAN GUGUS TUGAS TERUS DILAKUKAN
Pelaksanaan PTM, Tunggu Kasus Landai

YOGYA (KR) - Kenaikan kasus harian di DIY yang tergolong cukup signifikan (lebih dari 400 kasus) perlu dijadikan perhatian dan bahan evaluasi bersama. Karena kenaikan kasus tersebut menjadi indikator bahwa penegakan Prokes belum bisa dilaksanakan secara maksimal. Adanya kondisi tersebut secara tidak langsung menjadikan Disdikpora DIY lebih selektif dan hati-hati termasuk dalam pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) yang direncanakan oleh pemerintah pusat bisa dilaksanakan pada awal tahun ajaran baru mendatang.

“Sebelum memutuskan untuk melaksanakan PTM pada awal tahun ajaran baru mendatang, perkembangan kasus yang ada di lapangan akan menjadi pertimbangan. Jadi kalau terjadi lonjakan kasus yang dikhawatirkan bisa mengganggu kesehatan siswa atau guru kami tidak akan memaksakan untuk melaksanakan PTM. Jadi PTM sangat terbatas baru akan kami lakukan saat kasusnya sudah landai. Oleh karena itu, saat ini kami terus melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan dan Gugus Tugas,” kata Kepala Disdikpora DIY, Didik Wardaya MPd di Yogyakarta, Minggu (13/6).

Didik menyatakan, lonjakan kasus yang terjadi di DIY menjadi salah satu pertimbangan dari Disdikpora DIY. Untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal tidak diinginkan

uji coba PTM yang sudah berlangsung akan diganti secara daring. Semua itu dilakukan sambil menunggu kasusnya landai, sehingga PTM bisa dilaksanakan secara aman dan nyaman. Kondisi tersebut secara tidak langsung menjadi tantangan tersendiri bagi sekolah dan guru untuk memberikan layanan terbaik.

Kepala Disdikpora DIY itu menyatakan, pihaknya menargetkan vaksinasi bagi guru dan tenaga kependidikan jenjang SMA/SMK bisa diselesaikan pada Juni. Dengan begitu saat rencana pembelajaran tatap muka diterapkan, mereka bisa merasa lebih nyaman dan aman serta bisa memberikan layanan terbaik bagi siswa. Walaupun nantinya semua guru sudah mendapatkan vaksinasi Covid-19, guru dan tenaga kependidikan wajib menerapkan Prokes secara ketat.

Terkait pelaksanaan PTM selama pandemi ini, Ketua Forum Masyarakat Yogyakarta Peduli Pendidikan, Najib M Saleh mengingatkan agar menjadikan kesehatan anak dan guru menjadi yang utama. Karena itu, pelaksanaannya diharapkan tetap mengedepankan kehati-hatian. Jangnan sampai di sekolah muncul klaster baru.

Meski demikian, Najib mengingatkan agar harapan para orang tua agar pembelajaran tatap muka tetap diwujudkan, yakni saat kondisi sudah memungkinkan. **(Ria/Jon)-f**

Inggris Sambungan hal 1

Susunan pemain, Inggris: Pickford, Walker, Stones, Mings, Trippier, Rice, Phillips, Mount, Foden (Rashford 77'), Sterling (Calvert-Lewin 90'), Kane (Bellingham 82'). Kroasia: Livakovic;

Vrsaljko, Caleta-Car, Vida, Gvardiol, Modric, Brozovic (Vlasic 70'), Kovacic; Kramaric (Brekalo 70), Rebic (Petkovic 78), Perisic.

Polisi Sambungan hal 1

Anji yang lahir di Jakarta 5 Oktober 1975, adalah seorang penyanyi yang memiliki suara merdu dan cukup digemari pecinta musik Indonesia.

Selain itu, Anji memiliki ciri khas selalu

menggunakan topi. Anji pernah mengikuti ajang pencarian bakat dan menjadi vokalis kelompok musik Drive. Namun, pada tahun 2011 ia memutuskan bersolo karir.

Pemadaman Sambungan hal 1

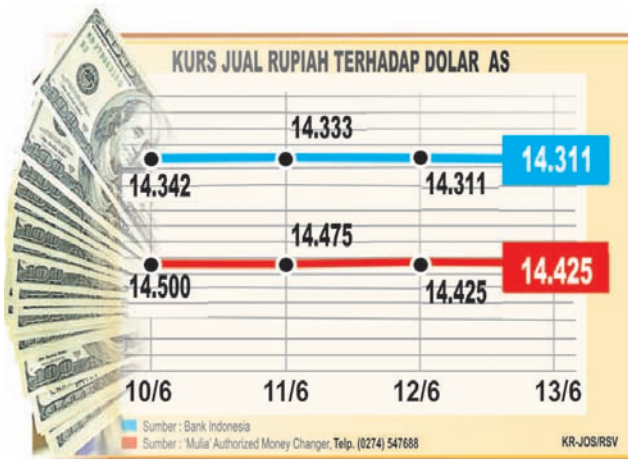
Dalam kesempatan itu Djoko juga mengapresiasi seluruh Anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompimda) Kabupaten Cilacap yang terus memberikan dukungan penuh dalam penanganan insiden ini.

“Ada Bupati, Wakil Bupati, Kapolres, Dandim, Danlanal dan Kajari yang selalu memberikan support kepada kami. Tak lupa teman-teman media yang terus menyampaikan perkembangan insiden ini secara berkala kepada masyarakat,”katanya.

Dijelaskan pula, dalam insiden kebakaran tersebut tidak mengakibatkan kendala apapun terhadap konsumen, baik

masyarakat umum maupun konsumen dari kalangan industri Petrokimia. “Seperti penegasan Ibu Nicke Widayawati, Dirut Pertamina, insiden ini sejak awal sama sekali tidak berdampak pada operasional kilang maupun distribusi BBM dan Elpiji. Semua aman,” jelasnya.

Dengan padamnya api yang membakar salah satu tangki penimbunan Bezene di Kilang Minyak Cilacap, langit Kota Cilacap kembali bersih cerah dari asap hitam yang muncul sejak insiden kebakaran itu terjadi. Masyarakat Cilacap yang bermukim di sekitar kilang minyak, juga sudah kembali beraktivitas seperti biasa. **(Mak)-f**



Prakiraan Cuaca				Senin, 14 Juni 2021		
Lokasi	Pagi	Siang	Malam	Dimi Hari	Suhu C	Kelembaban
Bantul					24-31	60-95
Sleman					23-31	65-95
Wates					24-31	60-95
Wonosari					23-31	65-95
Yogyakarta					23-31	65-95
Cerah				Berawan	Udara Kabur	Hujan Lokal
						Hujan Pelir

Gratis - Arko



Barka Satya, M. Kom
Ketua Program Studi Teknik Informatika Program Diploma Universitas Amikom Yogyakarta

SALAH satu bentuk pembelajaran dalam kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka adalah magang. Magang wajib dilaksanakan oleh pendidikan tinggi vokasi sebagai wahana pengenalan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja lainnya bagi mahasiswa. Magang juga sebagai media untuk melengkapi dan mengembangkan materi dasar yang telah dipelajari di kampus, berlatih menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki,

Fasilitasi Magang Vokasi

serta memahami suasana dan kondisi obyektif lapangan kerja.

Esensi pendidikan vokasi adalah upaya perguruan tinggi untuk memberikan keahlian. Keahlian tersebut meliputi soft skill maupun hard skill atau mental skill dan job skill. Tujuannya agar lulusannya nanti dapat beradaptasi dengan dunia kerja secara lancar. Dengan begitu, sekolah tersebut mampu mengangkat harkat dan derajat manusia setelah bertahun-tahun ia belajar di sekolah dengan biaya yang tidak sedikit.

Ditambah 2 keahlian saling mendukung yakni Job skill dan soft skill . Job skill ialah keahlian yang dibutuhkan oleh suatu pekerjaan. Umumnya, job skill berupa keahlian teknis atau keahlian akademik seperti Programmer komputer, animator dan lain-lain. Bidang ini penting karena dunia kerja sudah pasti membutuhkan

bukti-bukti yang visibel (bisa dilihat) dan dirasakan manfaatnya

Sementara soft skill merupakan keahlian yang dibutuhkan oleh manusia untuk melakukan pekerjaan itu. Bentuknya antara lain problem solving, komunikasi, mindset positif, motivasi, manajemen diri, dan seterusnya. Soft skill sangat penting karena menggerakkan seseorang untuk meningkatkan kualitas dirinya tidak sebatas sebagai pekerja seperti robot atau buruh (Hudaya, 2014: 283).

Melalui kegiatan magang ini diharapkan adanya suatu kecocokan materi yang telah dipelajari mahasiswa di bangku kuliah dengan pelaksanaan kegiatan sesungguhnya di dunia kerja. Di sisi lain akan diperlukan suatu kerjasama antara dunia kerja khususnya dalam jasa perbankan dengan lembaga pendidikan dalam

meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Magang Vokasi sendiri dinamai dengan Program fasilitasi magang yang dimana program fasilitasi magang ini diselenggarakan dengan tujuan meningkatkan intensitas kerja sama antara perguruan tinggi penyelenggara pendidikan vokasi dengan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja lainnya. Hal itu tentu merujuk pada "link and match" antara perguruan tinggi dengan IDUKA, serta meningkatkan kompetensi bagi mahasiswa vokasi yang sesuai dengan bidangnya.

Di tengah giatnya seruan tentang penumbuhan sektor ekonomi kreatif, yang dimana menurut Valentine Siagian, dkk, dalam buku Ekonomi dan Bisnis Indonesia (2020), ekonomi kreatif merupakan proses penciptaan,

kegiatan produksi dan distribusi barang serta jasa, yang dalam prosesnya membutuhkan kreativitas dan kemampuan intelektual. magang vokasi dianggap memegang peran sentral sangat penting, selain menitikberatkan pada keahlian tertentu yang dimiliki mahasiswa, sektor ini juga menekankan jiwa kewirausahaan. Sebuah upaya yang amat dibutuhkan untuk mengentaskan problem ekonomi bangsa, terutama masalah pengangguran usia produktif.

Tidak berhenti di kalangan mahasiswa dan Perguruan Tinggi saja , Pemerintah melalui terobosan mas Menteri Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) pun menggandeng pihak swasta (tiket.com) dalam menjalin kerja sama untuk mengembangkan kompetensi SDM, melalui Cross

Internship Program. Cross Internship Program ini adalah program pertukaran pegawai yang memungkinkan pesertanya mempelajari secara langsung pengalaman serta budaya kerja dari masing-masing instansi.

ASN Kemenparekraf dapat belajar inovasi sebagaimana yang kerap dilakukan di dunia usaha seperti tiket.com. Sedangkan, pegawai tiket.com juga dapat belajar tentang pendekatan pemikiran secara holistik dan kedisiplinan terhadap institusi sebagaimana yang diterapkan di pemerintahan," paparnya

program ini nantinya bisa menjadi model pengembangan kompetensi ASN yang dapat menghasilkan sumber daya manusia yang kolaboratif, inovatif, dan adaptif untuk Indonesia yang lebih baik. **(*)**

